



Research Article

Pengaruh Industri Migas Terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi Pasar Bojonegoro: Perspektif Ekonomi Syariah

Vica Aurelia Hartantri¹, Abdur Rahman²

1. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100167@student.trunojoyo.ac.id
2. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 18, 2025

Revised : December 13, 2025

Accepted : January 15, 2026

Available online : February 17, 2026

How to Cite: Vica Aurelia Hartantri, & Abdur Rohman. (2026). The Influence of the Oil and Gas Industry on Socioeconomic Inequality in the Bojonegoro Market: A Sharia Economic Perspective. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v3i1.34>

The Influence of the Oil and Gas Industry on Socioeconomic Inequality in the Bojonegoro Market: A Sharia Economic Perspective

Abstract. This study aims to analyze the influence of the oil and gas industry on socio-economic inequality in the market aspect of Bojonegoro Regency from the perspective of Islamic economics. Using a descriptive quantitative approach, the research was conducted in areas surrounding oil and gas exploitation sites, employing data collection methods such as observation, semi-structured interviews, and documentation studies. The results indicate that the oil and gas industry has transformed the local market structure into an oligopolistic system, where large-capital business actors dominate the trade and service sectors, leading to economic exclusion of micro and small enterprises. Additionally, the surge in goods and service prices has increased the cost of living without being

balanced by equitable income distribution among the local community. A simple linear regression analysis shows a significant but weak relationship between the presence of the oil and gas industry and the increase in local community income ($R^2 = 0.28$). From the perspective of Islamic economics, this condition contradicts the principles of distributive justice (al- 'adl) and public welfare (maslahah). Therefore, affirmative policies from local governments and more equitable and sustainable corporate social responsibility programs by oil and gas companies are needed to realize socio-economic balance in oil and gas-producing regions.

Keywords: oil and gas industry, socio-economic inequality, market, Islamic economics, Bojonegoro.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh industri minyak dan gas bumi (migas) terhadap ketimpangan sosial ekonomi dalam aspek pasar di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif ekonomi syariah. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini dilaksanakan di wilayah sekitar eksploitasi migas dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas industri migas telah mengubah struktur pasar lokal menjadi oligopolistik, di mana pelaku usaha bermodal besar mendominasi sektor perdagangan dan jasa, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil mengalami eksklusivitas ekonomi. Selain itu, lonjakan harga barang dan jasa menyebabkan peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan hubungan signifikan namun lemah antara keberadaan industri migas dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal ($R^2 = 0,28$). Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi (al-'adl) dan kemaslahatan umum (maslahah). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif pemerintah daerah dan tanggung jawab sosial perusahaan migas yang lebih merata dan berkelanjutan untuk mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di daerah penghasil migas.

Kata Kunci: Industri migas, ketimpangan sosial ekonomi, pasar, ekonomi syariah, Bojonegoro.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang cukup melimpah. Sejak ditemukannya ladang minyak Banyu Urip di Blok Cepu dan dimulainya kegiatan eksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan asing maupun nasional, Bojonegoro telah mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan. Kehadiran industri migas diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan tujuan utama pembangunan sektor energi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam perspektif ekonomi syariah, ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang harus diatasi karena bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan (al-'adl) dan kemaslahatan umum (maslahah). Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemerataan hasil pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok tertentu sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah ketimpangan yang terjadi di Bojonegoro akibat aktivitas industri migas melalui kacamata ekonomi syariah.¹

¹ Al-Qur'an Surat Al-Hasyr: 7

Studi dan observasi menunjukkan bahwa industri migas juga membawa dampak yang kontradiktif, khususnya terhadap ketimpangan sosial ekonomi masyarakat di daerah penghasil migas. Ketimpangan yang dimaksud mencakup ketimpangan pendapatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, hingga kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang yang lebih siap secara modal dan keterampilan. Ketimpangan ini dapat dilihat dalam aspek pasar, seperti perbedaan daya beli masyarakat, akses terhadap peluang usaha, dan distribusi kepemilikan aset ekonomi yang tidak merata. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan memicu konflik horizontal di masyarakat.²

Aspek pasar menjadi salah satu dimensi penting yang mencerminkan dampak langsung dan tidak langsung dari aktivitas industri migas. Aktivitas ekonomi di sektor informal maupun formal di Bojonegoro turut mengalami perubahan akibat adanya perputaran uang dalam jumlah besar dari sektor migas. Sektor perdagangan, jasa, serta properti mengalami pertumbuhan pesat, namun tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara merata. Terjadi polarisasi antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan dinamika pasar baru dan kelompok yang terpinggirkan karena keterbatasan sumber daya, baik modal, akses, maupun informasi.³

Kehadiran perusahaan migas sering kali menciptakan struktur pasar yang cenderung oligopolistik atau monopsonistik di tingkat lokal, di mana hanya segelintir pelaku usaha yang mampu menjadi mitra atau vendor resmi dari perusahaan migas. Hal ini menimbulkan dominasi pasar oleh kelompok tertentu dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antar pelaku usaha. Selain itu, meningkatnya harga barang dan jasa di sekitar wilayah eksploitasi migas juga menambah beban hidup bagi masyarakat yang tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas industri tersebut.⁴

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pemeritah

Dalam perspektif ekonomi syariah, ketimpangan ekonomi dipandang sebagai bentuk ketidakadilan distribusi kekayaan yang dilarang dalam Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan larangan menumpuk kekayaan pada segelintir kelompok saja. Distribusi kekayaan yang adil merupakan syarat utama tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Islam juga melarang praktik monopoli (ihtikar) yang dapat menyebabkan ketimpangan harga dan akses pasar. Pengelolaan sumber daya alam seperti migas wajib memperhatikan kepentingan umat secara keseluruhan.⁶

² Kusuma, H. (2021). "Dampak Industri Migas terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Daerah Penghasil Migas." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 112-124.

³ Nurhadi, M., & Rahayu, S. (2019). "Perubahan Struktur Pasar Akibat Aktivitas Migas di Daerah Rural." *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(3), 88-101.

⁴ ExxonMobil Cepu Limited. (2022). *Laporan Tahunan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.

⁵ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

⁶ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Terdapat perbedaan antara kebijakan dan keputusan tepatnya “kebijakan ruang lingkupnya jauh lebih besar daripada keputusan. Kebijakan pada umumnya terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait”. Bahwa kebijakan yang mengalami kegagalan disebabkan oleh “kebijakan yang jelek (*bad policy*), faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), atau kebijakan bernasib jelek (*bad lucky*)”. Redelf dan Stance stakeholder adalah masyarakat yang terorganisir dengan baik atau buruk dan terpengaruh oleh kebijakan publik.⁷

1. Industri Migas dan Pembangunan Wilayah

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Jawa Timur. Namun, meskipun sektor migas memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, indikator pembangunan seperti pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan masih menunjukkan ketertinggalan dibandingkan rata-rata provinsi. Penelitian menunjukkan bahwa sektor migas memberikan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta pengaruh tidak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja.⁸

2. Ketimpangan Sosial Ekonomi di Daerah Penghasil Migas

Kehadiran industri migas seringkali menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi, terutama dalam aspek pasar dan mengungkapkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor migas tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.⁹

3. Struktur Pasar dan Aksesibilitas Ekonomi

Industri migas dapat mempengaruhi struktur pasar lokal, menciptakan kondisi oligopoli atau monopsoni yang membatasi akses pelaku usaha lokal. Penelitian di Desa Wonocolo menunjukkan bahwa meskipun pertambangan minyak tradisional meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, aktivitas tersebut juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi masyarakat.¹⁰

4. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Sektor migas memiliki potensi dalam menyerap tenaga kerja lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian oleh Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial (2019) menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro menilai peran

⁷ Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara: Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.

⁸ Ariyanti, D. R., & Santoso, E. B. (2013). Pengaruh Sektor Migas terhadap Pengembangan Wilayah Bojonegoro. *Jurnal Teknik ITS*, 2(2).

⁹ Fitriana, A. N., & Cahyono, H. (2023). Pengaruh PDRB Sektor Migas dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomika: INDEPENDEN*, 3(1), 20–28.

¹⁰ Andriyan, R., Astutik, S., Wijayanto, Y., Kurnianto, F. A., & Pangastuti, E. I. (2024). The Analysis of the Impact of Petroleum Mining on the Environment and Community Economy in Wonocolo Village of Bojonegoro Regency. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(3), 280–287.

sektor migas dalam penyerapan tenaga kerja cukup baik, terutama dalam usaha subkontraktor seperti catering dan bengkel.¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengaruh industri migas terhadap ketimpangan sosial ekonomi dalam aspek pasar di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel secara numerik, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan fenomena sosial ekonomi yang terjadi akibat aktivitas migas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar wilayah eksploitasi migas seperti Kecamatan Gayam, Kalitidu, dan Ngasem. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan, dari Maret hingga April 2025.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi : Digunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, persepsi terhadap industri migas, serta dampaknya terhadap aktivitas pasar lokal.
2. Wawancara semi-terstruktur: Diperlukan untuk menggali informasi kualitatif dari tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan aparat desa.
3. Studi Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder dari dokumen pemerintah daerah, laporan CSR perusahaan migas, serta data BPS Kabupaten Bojonegoro.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen (aktivitas industri migas) terhadap variabel dependen (ketimpangan sosial ekonomi dalam aspek pasar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Struktur Pasar

Dalam perspektif ekonomi syariah, ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di Bojonegoro akibat aktivitas industri migas tidak sejalan dengan prinsip keadilan distribusi. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Distribusi dana CSR dan kompensasi yang kurang merata menimbulkan kecemburuan sosial dan pelanggaran terhadap prinsip

¹¹ Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. (2019). Peran Sektor Industri Migas Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 3(1), 341-357.

masalah. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam merupakan amanah untuk kemaslahatan bersama, dan ketimpangan distribusi hasil migas dapat menimbulkan kerusakan sosial yang bertentangan dengan maqashid syariah. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyebutkan bahwa menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, distribusi hasil industri migas seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas ketimbang kepentingan elit tertentu.

Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa struktur pasar di wilayah tempat tinggal mereka mengalami perubahan signifikan sejak adanya industri migas. Sektor perdagangan dan jasa mengalami pertumbuhan pesat, namun hanya pelaku usaha bermodal besar yang mampu bertahan dan berkembang. Hal ini menunjukkan adanya proses eksklusi ekonomi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.

Peningkatan PDRB akibat migas tidak serta-merta menjamin distribusi kesejahteraan yang merata di masyarakat. Adanya kecenderungan pasar menjadi oligopolistik, di mana hanya segelintir pelaku ekonomi yang mendominasi pasar, memperburuk ketimpangan.¹²

Akses terhadap Peluang Ekonomi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lokal menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi yang berkaitan langsung dengan industri migas. Dari 100 responden, hanya 22% yang pernah mendapat manfaat langsung dari keberadaan industri migas, seperti menjadi vendor, pemasok bahan makanan, atau penyedia jasa penunjang. Sisanya hanya merasakan efek tidak langsung seperti peningkatan harga barang atau penggusuran tempat usaha.

Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi masih tinggi kontribusi migas terhadap penurunan kemiskinan lebih banyak terjadi melalui jalur tidak langsung dan seringkali bersifat jangka pendek.¹³

Dampak terhadap Harga Barang dan Biaya Hidup

Salah satu dampak paling dirasakan masyarakat lokal adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Masyarakat mengeluhkan lonjakan harga sewa rumah, bahan pokok, dan jasa sejak beroperasinya industri migas di Bojonegoro. Kenaikan harga ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat masuknya harga yang tidak stabil, seringkali merugikan masyarakat lokal yang tidak terlibat langsung dalam industri tersebut.¹⁴

Ketimpangan Pendapatan dan Daya Beli

Analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan namun lemah antara keberadaan industri migas dan peningkatan

¹² Fitriana, R., & Cahyono, B. (2023). *Ketimpangan Ekonomi di Daerah Penghasil Migas*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 45–55.

¹³ Ariyanti, N., & Santoso, D. (2013). *Pengaruh Sektor Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 123–134.

¹⁴ Andriyan, R., et al. (2024). *Dampak Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Tradisional*. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 78–90.

pendapatan masyarakat lokal (nilai $R^2 = 0,28$). Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang berhasil meningkatkan pendapatannya, sementara sebagian besar lainnya tidak mengalami perubahan signifikan atau justru terdampak negatif karena beban biaya hidup yang meningkat.¹⁴

KESIMPULAN

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan industri migas di Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak yang kontradiktif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam aspek pasar. Di satu sisi, aktivitas migas mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan properti. Namun di sisi lain, manfaat ekonomi tersebut belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Perubahan struktur pasar menjadi cenderung oligopolistik menyebabkan dominasi pelaku usaha bermodal besar, sementara pelaku usaha mikro dan kecil mengalami eksklusi ekonomi.

Kenaikan harga barang dan jasa akibat meningkatnya permintaan dari pendatang dan tenaga kerja industri migas berdampak pada biaya hidup masyarakat lokal, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak secara langsung terlibat dalam sektor migas. Akses masyarakat terhadap peluang ekonomi juga masih terbatas, dengan hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas migas.

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan hubungan yang signifikan namun lemah antara keberadaan industri migas dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal ($R^2 = 0,28$), menandakan bahwa industri migas belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bojonegoro.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*), di mana seharusnya kekayaan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Ketimpangan distribusi manfaat migas berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan kecemburuan horizontal yang tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*).

Dalam Industri Migas diperlukan kebijakan afirmatif yang berpihak pada pelaku usaha lokal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas program kemitraan serta CSR perusahaan migas, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Selain itu, perlu strategi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas ekonomi lokal agar manfaat industri migas dapat dirasakan secara lebih adil, merata, dan berkeadilan sosial sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki kondisi ketimpangan sosial ekonomi akibat aktivitas industri migas di Kabupaten Bojonegoro:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Perlu merancang kebijakan afirmatif yang berpihak kepada pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar wilayah eksploitasi migas, agar mereka dapat bersaing dan turut

- menikmati perputaran ekonomi yang terjadi.
- b. Menetapkan regulasi pasar yang adil untuk mencegah terjadinya dominasi pasar oleh kelompok bermodal besar serta mendorong distribusi peluang usaha secara merata.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil migas dan program CSR untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah, seperti pelatihan kewirausahaan halal, pembentukan koperasi syariah, dan pendampingan usaha mikro.
2. Perusahaan Migas
 - a. Wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), agar manfaat ekonomi dapat menjangkau masyarakat lokal secara lebih luas.
 - b. Mendorong kemitraan bisnis yang inklusif, dengan memberi kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha lokal untuk menjadi vendor, mitra kontraktor, atau penyedia jasa penunjang.
 - c. Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan kerja berbasis syariah dan usaha produktif kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi.
 3. Masyarakat Lokal
 - a. Perlu meningkatkan kapasitas ekonomi dan kompetensi usaha, baik melalui pelatihan, pendidikan keterampilan, maupun penguatan jaringan usaha komunitas berbasis syariah.
 - b. Mendorong terbentuknya lembaga ekonomi berbasis komunitas seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau koperasi syariah yang dapat menjadi instrumen distribusi manfaat ekonomi secara adil.
 4. Penelitian Selanjutnya
 - a. Disarankan untuk memperluas fokus penelitian pada aspek-aspek ketimpangan lainnya, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, serta lingkungan hidup di wilayah penghasil migas.
 - b. Melakukan analisis longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang industri migas terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program CSR perusahaan migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an. (n.d.). Surat Al-Hasyr ayat 7.
- Andriyan, R., Astutik, S., Wijayanto, Y., Kurnianto, F. A., & Pangastuti, E. I. (2024). The analysis of the impact of petroleum mining on the environment and community economy in Wonocolo Village of Bojonegoro Regency. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(3), 280–287.
- Andriyan, R., et al. (2024). Dampak ekonomi dan lingkungan pertambangan tradisional. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 78–90.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariyanti, D. R., & Santoso, E. B. (2013). Pengaruh sektor migas terhadap pengembangan wilayah Bojonegoro. *Jurnal Teknik ITS*, 2(2).
- Ariyanti, N., & Santoso, D. (2013). Pengaruh sektor migas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 123-134.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Kabupaten Bojonegoro dalam angka 2023*. Bojonegoro: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- ExxonMobil Cepu Limited. (2022). *Laporan tahunan dan tanggung jawab sosial perusahaan*.
- Fitriana, A. N., & Cahyono, H. (2023). Pengaruh PDRB sektor migas dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomika: INDEPENDEN*, 3(1), 20-28.
- Fitriana, R., & Cahyono, B. (2023). Ketimpangan ekonomi di daerah penghasil migas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 45-55.
- Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. (2019). Peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 3(1), 341-357.
- Kusuma, H. (2021). Dampak industri migas terhadap ketimpangan sosial ekonomi di daerah penghasil migas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 112-124.
- Nurhadi, M., & Rahayu, S. (2019). Perubahan struktur pasar akibat aktivitas migas di daerah rural. *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(3), 88-101.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (Edisi ke-2, Cetakan ke-5). Jakarta: Bumi Aksara.